

## ANALISIS KEBIJAKAN KOPERASI MERAH PUTIH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN GARUT

Sartika Khoerunnisa<sup>1\*</sup>, Rd. Ade Purnawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Garut, Garut, Indonesia

\*Korespondensi: 24012122040@uniga.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Koperasi Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Garut sebagai bentuk transformasi kelembagaan yang berorientasi pada kemandirian dan partisipasi masyarakat. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kebijakan koperasi ini diimplementasikan, dikelola, dan memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data berbantuan perangkat lunak Nvivo, melalui teknik wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap kepala desa, pengurus koperasi, serta anggota masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Koperasi Merah Putih didukung oleh lima dimensi utama yaitu koordinasi, transparansi, partisipasi, hambatan, dan dampak yang saling terkait dalam memperkuat efektivitas kebijakan. Koperasi berperan sebagai wadah ekonomi sekaligus forum sosial yang mendorong kolaborasi antaraktor desa. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih menjadi model kebijakan baru yang memperkuat kemandirian ekonomi, transparansi tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Ekonomi Desa; Kebijakan Koperasi; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Berkelanjutan; Tata Kelola Desa

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the policies of the Merah Putih Cooperative in rural economic development in Garut Regency as a form of institutional transformation oriented towards community independence and participation. The main issue examined is how these cooperative policies are implemented, managed, and impact the strengthening of the rural economy. This study uses a qualitative approach with data analysis assisted by Nvivo software, through in-depth interviews and documentation of village heads, cooperative administrators, and community members. The results show that the Merah Putih Cooperative policy is supported by five main dimensions, namely coordination, transparency, participation, obstacles, and impacts that are interrelated in strengthening the effectiveness of the policy. Cooperatives serve as both an economic platform and a social forum that encourages collaboration among village actors. The conclusion of this study confirms that the Merah Putih Cooperative is a new policy model that strengthens economic independence, governance transparency and community participation in sustainable village development.*

**Keywords:** Village Economy; Cooperative Policy; Community Participation; Sustainable Development; Village Governance.

### A. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun capaian pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cukup stabil di kisaran 5 persen per tahun, tingkat kesejahteraan masyarakat belum merata, terutama di wilayah pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47 persen, setara dengan 23,85 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, kemiskinan di pedesaan mencapai 11,03 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan yang hanya 6,73 persen (Statistics Indonesia (BPS), 2025). Disparitas ini menegaskan bahwa ruang pedesaan masih menjadi episentrum kemiskinan, di mana keterbatasan akses terhadap modal, infrastruktur, lapangan kerja serta layanan sosial dasar menjadi penghambat utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa sebagai unit sosial ekonomi terkecil memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Lebih dari 43 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perikanan dan usaha kecil menengah (Statistik, 2025). Namun, sektor-sektor tersebut masih didominasi oleh pola produksi tradisional dengan tingkat nilai tambah rendah. Akibatnya, pendapatan masyarakat desa cenderung stagnan dan tingkat kemiskinan sulit ditekan secara signifikan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Kenaikan PDRB per kapita ini juga menandakan potensi ekonomi lokal yang dapat dioptimalkan melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, termasuk koperasi desa. Rincian perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Garut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1** PDRB Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2019–2023

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp Juta)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	adh Berlaku	adh Konstan		adh Berlaku	adh Konstan
2019	22,12	14,939	2.622.425	8,69	4,60
2020	22,48	14,949	2.585.607	1,65	0,07
2021	23,36	15,349	2.604.787	3,90	2,68
2022	25,35	15,991	2.627.220	8,52	4,18
2023	26,91	16,427	2.683.665	6,19	2,73

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024.

Selain peningkatan PDRB per kapita yang menunjukkan pertumbuhan

ekonomi daerah, struktur ekonomi Kabupaten Garut juga memperlihatkan

dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Sektor-sektor lain seperti perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta konstruksi juga memiliki peranan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa. Data berikut memperlihatkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Garut menurut lapangan usaha selama periode 2019–2023.

Kabupaten Garut menjadi salah satu wilayah prioritas pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di Provinsi Jawa Barat. Garut dikenal memiliki potensi ekonomi desa yang besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan industri rumahan. Namun, tantangan kemiskinan di daerah ini masih cukup signifikan. Berdasarkan data (Statistik, 2025), tingkat kemiskinan mencapai 10,49 persen, di mana sebagian besar penduduk miskin tinggal di wilayah perdesaan dengan aktivitas ekonomi tradisional dan produktivitas yang rendah. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan, lemahnya kapasitas manajerial pelaku usaha desa serta minimnya literasi keuangan menjadi faktor penghambat utama berkembangnya ekonomi masyarakat setempat.

Kehadiran Koperasi Merah Putih di Kabupaten Garut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan sosial yang menghubungkan berbagai pelaku ekonomi di desa mulai dari petani,

pelaku UMKM, kelompok perempuan hingga pemuda desa. Melalui pengelolaan koperasi yang profesional dan berbasis kebutuhan lokal, program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat rantai nilai ekonomi desa serta memperluas jaringan distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas. Namun, implementasi program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat karena pemahaman koperasi yang terbatas, keterlambatan penyaluran modal dari lembaga keuangan, rendahnya literasi keuangan dan manajemen koperasi di tingkat desa serta kurangnya infrastruktur dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan data nasional yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong terbatas, di mana indeks literasi keuangan baru mencapai sekitar 49,68%, yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi (Keuangan, 2022). Selain itu, penelitian lain juga mengungkap bahwa kelemahan dalam tata kelola serta rendahnya pemahaman keuangan menyebabkan stagnasi operasional koperasi dan menghambat partisipasi anggota (Pebriani, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa di

Kabupaten Garut, bagaimana tata kelola koperasi dalam mendorong partisipasi masyarakat, serta bagaimana dampak dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap penguatan ekonomi desa.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Garut dengan fokus pada tiga desa yang mewakili variasi tingkat pelaksanaan program KMP, desa dengan implementasi tinggi yaitu desa sirnasari, sedang yaitu desa parakan dan rendah yaitu desa cisarua. Pemilihan lokasi menggunakan desain *multi-site case study*, karena memungkinkan peneliti membandingkan fenomena di beberapa konteks sekaligus (Sintang, 2024)

Responden penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan posisi, pengalaman dan keterlibatan langsung dengan kebijakan KMP. Teknik ini sejalan dengan pendapat (Ani et al., 2021) bahwa *purposive sampling* digunakan untuk memperoleh sumber data yang paling memahami fenomena yang diteliti dan diperkuat oleh Patton dalam (Elizabeth Kristi Poerwandari, 2007) yang menekankan pemilihan informan yang *information-rich* atau kaya informasi. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah lima (5) orang, terdiri atas: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengurus Koperasi Merah Putih, Pelaku Usaha Mikro (UMKM), Petani atau Masyarakat Non-UMKM, karena berperan sebagai penerima dampak tidak langsung dan dapat menggambarkan persepsi serta tingkat

partisipasi masyarakat terhadap kebijakan KMP di luar sektor usaha.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Wordcloud Analysis*

Berdasarkan *word cloud* hasil analisis data menggunakan Nvivo, terlihat bahwa kata-kata yang sering muncul berasal dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengurus Koperasi, Anggota Petani, dan Anggota Non-Petani. Kata-kata tersebut memperlihatkan bahwa tujuan dari kebijakan Koperasi Merah Putih adalah untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan mempercepat pembangunan ekonomi desa melalui peningkatan fungsi kelembagaan koperasi sebagai pendorong aktivitas ekonomi produktif. Terdapat beberapa kata dengan frekuensi tertinggi, di antaranya masyarakat, koperasi, anggota, pengurus dan belum, yang menjadi penanda penting bahwa proses implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah dinamika, baik dalam aspek koordinasi kelembagaan, keaktifan anggota maupun efektivitas program di tingkat desa di Kabupaten Garut.

### 2. *Hierarchy Chart Analysis*

Berdasarkan gambar *Hierarchy Chart Analysis* di atas, dapat digambarkan bahwa dimensi hambatan, koordinasi, transparansi, partisipasi, dan dampak saling terhubung dalam satu sistem kebijakan yang menggambarkan dinamika pelaksanaan Koperasi Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Garut. Visualisasi ini menunjukkan keterkaitan antar elemen kebijakan yang saling memengaruhi, di mana dimensi *hambatan* dan *koordinasi*

memiliki bobot yang paling besar, menandakan bahwa tantangan internal serta efektivitas koordinasi antarpihak menjadi penentu keberhasilan kebijakan koperasi. Untuk memperjelas hubungan antar dimensi tersebut, berikut disajikan tabel yang merangkum dimensi, indikator, dan capaian hasil.

Koordinasi merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan koperasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa koordinasi antar pengurus koperasi, pemerintah desa, dan anggota masih belum konsisten. Minimnya musyawarah dan komunikasi rutin menyebabkan kebijakan koperasi berjalan secara parsial. Penelitian oleh Haris et al. menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola ekonomi lokal bergantung pada sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terkoordinasi (Gede Sandita Pratama, 2024). Di Garut, kelemahan koordinasi ini berdampak pada tidak seragamnya implementasi program koperasi antar desa. Selain itu, studi oleh Harsanto & Wahyuningrat juga menemukan bahwa kegagalan kolaborasi antar desa sering disebabkan oleh lemahnya mekanisme komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan (G. Sandita Pratama, 2024).

Partisipasi menjadi elemen penting yang menunjukkan sejauh mana masyarakat merasa memiliki dan terlibat dalam aktivitas koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Garut masih rendah, terutama karena kurangnya sosialisasi dan manfaat langsung yang dirasakan. Kondisi ini serupa dengan temuan Jeddawi et al. yang menyebutkan bahwa kepercayaan dan

komunikasi yang terbuka antar-aktor adalah faktor utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa (Efendi, 2025). Selain itu, Faried et al. menambahkan bahwa partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan di koperasi desa menjadi indikator kunci keberhasilan kebijakan regulatif di tingkat daerah (Annisa Ilmi Faried, 2025). Dalam konteks Garut, peningkatan partisipasi dapat dilakukan melalui penguatan literasi ekonomi dan peningkatan kapasitas organisasi anggota koperasi.

Dimensi dampak menunjukkan hasil nyata dari kebijakan koperasi terhadap masyarakat. Di Kabupaten Garut, dampak ekonomi sudah mulai terlihat melalui peningkatan akses modal dan pemberdayaan usaha kecil. Namun, dampak sosialnya masih terbatas pada kelompok masyarakat tertentu. Menurut Siregar et al. efektivitas koperasi di Indonesia sangat bergantung pada integrasi kebijakan dan keterlibatan aktif seluruh anggota dalam kegiatan ekonomi desa (Abi Pratiwa Siregar, 2025). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus, serta perluasan jangkauan manfaat menjadi strategi penting untuk memastikan koperasi dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih merata.

### 3. *Mind Map Analysis*

Berdasarkan *mind map* hasil analisis Nvivo di atas, terlihat bahwa kebijakan Koperasi Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Garut dapat dijelaskan melalui lima dimensi utama, yaitu hambatan, koordinasi, transparansi, partisipasi dan dampak. Setiap dimensi

menunjukkan hubungan sebab-akibat yang saling memengaruhi antara kelembagaan koperasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa. Struktur *mind map* ini menggambarkan bagaimana faktor internal seperti kepercayaan masyarakat, kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola, berinteraksi dengan faktor eksternal seperti koordinasi antar pihak desa serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan koperasi.

Dimensi hambatan menempati posisi krusial dalam peta konsep ini karena menjadi akar dari sebagian besar permasalahan kebijakan koperasi di Garut. Hambatan yang diidentifikasi meliputi keterbatasan modal, rendahnya kepercayaan masyarakat, rendahnya kesiapan SDM, hingga masalah struktural akibat pendekatan *top-down policy*. Hasil ini sejalan dengan temuan Siregar et al. yang menyebutkan bahwa tantangan utama koperasi pertanian di Pulau Jawa adalah kurangnya sinergi antar anggota dan keterbatasan manajemen profesional dalam pengelolaan sumber daya ekonomi (Abi Pratiwa Siregar, 2025). Di Garut, situasi ini semakin kompleks karena masih kuatnya pola birokratis dan minimnya dukungan pelatihan bagi anggota koperasi.

Dimensi koordinasi menjadi penghubung antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat desa. Berdasarkan hasil analisis, koordinasi melibatkan indikator seperti penyediaan ruang desa, kegiatan musyawarah, intensitas komunikasi, dan pemantauan oleh pihak desa. Kualitas koordinasi yang baik berperan penting dalam memastikan kebijakan koperasi berjalan konsisten

dan berkesinambungan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Taufiq et al. yang menjelaskan bahwa koordinasi lintas aktor dalam perencanaan pembangunan desa di Indonesia menentukan efektivitas kebijakan berbasis kolaboratif (Muhammad Taufiq, 2022). Selain itu, Koswara et al. menegaskan bahwa keberhasilan koperasi di daerah sangat bergantung pada model multi-stakeholder yang menekankan koordinasi dan pembagian peran antara pemerintah, masyarakat dan pengurus koperasi (Asep Koswara, 2025).

Selanjutnya, dimensi transparansi menggambarkan aspek keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi masih terbatas pada pengawasan dan pelaporan internal, belum sepenuhnya melibatkan anggota secara terbuka. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi desa. Penelitian Padilah et al. menegaskan bahwa praktik transparansi yang baik dalam pemerintahan desa mampu meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga lokal (Ahirul Habib Padilah, 2023). Dalam konteks koperasi di Garut, penguatan transparansi melalui digitalisasi dan pelaporan terbuka sebagaimana disarankan oleh Mayasari menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola modern yang lebih kredibel (Lokantara., 2025).

Dimensi partisipasi menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan koperasi. Analisis Nvivo menemukan

bahwa partisipasi masyarakat masih minim, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, rendahnya kepercayaan, serta belum adanya sistem insentif bagi anggota aktif. Hasil ini sejalan dengan temuan Efendi et al. yang menekankan bahwa kolaborasi dan kepercayaan antar aktor lokal adalah fondasi utama dalam meningkatkan partisipasi publik di tingkat desa (Efendi, 2025). Selain itu, studi Sambodo et al. menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program (Maxencius Tri Sambodo, 2023). Di Garut, koperasi perlu memperluas ruang partisipatif bagi masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor penggerak ekonomi desa.

#### **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini kemudian dibahas dengan membandingkannya terhadap kebijakan nasional serupa yang telah lebih dahulu diterapkan di Indonesia, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat tingkat kejelasan (konsistensi) maupun perbedaan orientasi kebijakan, serta menjelaskan secara ilmiah posisi hasil penelitian Koperasi Merah Putih yang merupakan kebijakan baru berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Desa. Kedua kebijakan ini sama-sama berupaya memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pemberdayaan sosial dan kelembagaan, namun memiliki karakteristik yang

berbeda dalam pendekatan, tata kelola, dan keberlanjutan program.

Hasil analisis Nvivo menunjukkan bahwa lima dimensi utama koordinasi, transparansi, partisipasi, hambatan dan dampak mencerminkan pola yang serupa dengan PNPM dalam hal pemberdayaan masyarakat, namun menampilkan perbedaan substansial dalam mekanisme pelaksanaannya. Pada dimensi koordinasi, penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas program Koperasi Merah Putih bergantung pada keterpaduan antara pengurus koperasi, pemerintah desa dan masyarakat sebagai anggota aktif. Temuan ini konsisten dengan hasil Sambodo, Hidayat, dan Rahmayanti yang menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa berbasis komunitas ditentukan oleh koordinasi lintas aktor dan kolaborasi yang kuat (Maxencius Tri Sambodo, 2023). Namun, berbeda dari PNPM yang lebih mengandalkan fasilitator eksternal, Koperasi Merah Putih menempatkan pemerintah desa dan pengurus koperasi sebagai penggerak utama koordinasi di tingkat lokal. Perbedaan ini mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan *top-down facilitation* menuju *institutional self-governance*, di mana desa menjadi pusat kendali pembangunan ekonomi berbasis kelembagaan.

Pada aspek transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih mengedepankan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh anggota koperasi. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dibandingkan dengan PNPM Mandiri yang meskipun mengatur

mekanisme musyawarah terbuka, masih menghadapi kendala dalam distribusi informasi kepada masyarakat (Ahirul Habib Padilah, 2023) . Secara ilmiah, penerapan prinsip transparansi di Koperasi Merah Putih memperkuat aspek akuntabilitas publik dan membangun kembali kepercayaan sosial masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa sebuah faktor yang selama ini menjadi tantangan utama dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Meskipun demikian, dimensi hambatan dalam penelitian ini menunjukkan adanya tantangan yang mirip dengan PNPM, terutama terkait keterbatasan modal awal, kapasitas sumber daya manusia dan kesenjangan pemahaman antara pengurus dan anggota. Namun, strategi penanganannya berbeda. Jika PNPM mengandalkan alokasi dana pemerintah pusat, Koperasi Merah Putih menekankan konsep *self-sustaining economy* melalui kontribusi anggota dan pengelolaan aset desa. Pendekatan ini mencerminkan arah baru kebijakan ekonomi desa yang lebih mandiri dan konsisten dengan prinsip keberlanjutan sebagaimana dijelaskan oleh Rahmajati & Bawono, bahwa koperasi menjadi instrumen efektif dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan karena mampu mengintegrasikan prinsip *sustainability* dengan tata kelola partisipatif (Emir Surya Rahmajati, 2025).

Dari segi dampak, hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih mulai memberikan efek ekonomi nyata, terutama dalam memperluas akses permodalan dan meningkatkan

aktivitas usaha kecil di tingkat desa. Namun, dampaknya masih terbatas pada anggota koperasi yang aktif. Hal ini berbeda dari PNPM Mandiri, yang lebih menonjolkan dampak sosial berupa peningkatan kapasitas masyarakat namun kurang menghasilkan dampak ekonomi langsung. Temuan ini memperkuat hasil Wahyuningrat et al. yang menekankan pentingnya keberadaan lembaga ekonomi lokal yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya ekonomi berkelanjutan (Wahyuningrat, 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki arah kebijakan yang konsisten dengan semangat pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri, namun menawarkan pendekatan yang lebih kuat dari sisi kelembagaan, keberlanjutan ekonomi, dan transparansi. Secara ilmiah, perbedaan ini mencerminkan perubahan paradigma pembangunan dari model proyek sementara menuju sistem ekonomi desa yang berorientasi jangka panjang dan berdaya saing. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan koperasi dapat menjadi solusi atas kelemahan program sebelumnya yang bersifat temporal. Kelebihan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan pemahaman empiris awal terhadap transformasi kebijakan koperasi pasca-Inpres No. 9 Tahun 2023, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan waktu observasi karena koperasi ini masih berada dalam tahap awal pelaksanaan. Meski demikian, temuan ini membuka ruang bagi penelitian

lanjutan mengenai efektivitas kebijakan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.

#### D. KESIMPULAN

Kebijakan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Garut merupakan langkah inovatif dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pendekatan kelembagaan yang partisipatif. Koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi sosial yang menyatukan pemerintah desa, pengurus, dan masyarakat dalam satu sistem tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel. Temuan analisis menunjukkan bahwa lima dimensi utama *koordinasi, transparansi, partisipasi, hambatan* dan *dampak* berperan penting dalam membentuk efektivitas kebijakan ini. Koordinasi antaraktor lokal memperkuat implementasi kebijakan, transparansi meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi meneguhkan peran masyarakat sebagai penggerak pembangunan. Hambatan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan modal awal menjadi refleksi penting bagi upaya penguatan kelembagaan ke depan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan model pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian masyarakat desa. Pendekatan ini menawarkan transformasi dari pola kebijakan pembangunan yang bersifat sementara menuju sistem kelembagaan yang hidup di tengah masyarakat. Penelitian ini juga memberikan

kontribusi ilmiah dalam memperkaya teori kebijakan publik berbasis komunitas, terutama dalam konteks bagaimana kelembagaan lokal mampu menjadi katalis pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Secara sosial dan budaya, Koperasi Merah Putih memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas warga desa secara ekonomi, mendorong pertumbuhan usaha kecil dan peningkatan kesejahteraan sedangkan dari sisi tata kelola, menumbuhkan praktik transparansi dan akuntabilitas di tingkat akar rumput.

Hasil ini memperlihatkan bahwa kebijakan Koperasi Merah Putih menjawab kebutuhan pembangunan desa yang lebih adaptif, kolaboratif dan inklusif. Kebijakan ini memperlihatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk bertransformasi dari penerima kebijakan menjadi pelaku utama pembangunan. Melalui penguatan koordinasi, partisipasi aktif, dan sistem kelembagaan yang transparan, Koperasi Merah Putih menegaskan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika masyarakat ditempatkan sebagai pusat dari proses kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya relevan bagi konteks lokal Garut, tetapi juga memiliki potensi menjadi model nasional dalam membangun ekonomi berbasis komunitas yang berkeadilan dan berdaya tahan.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

Abi Pratiwa Siregar, C. O. (2025). *Assessment of China's provincial*

- energy-environment-economy efficiency and its influencing factors: A network DEA and spatial econometric analysis. Journal of Cleaner Production.*
- Ahirul Habib Padilah, A. R. (2023). *Enhancing Rural Community Development Through Political Transparency. Empowerment and Islamic Studies.*
- Annisa Ilmi Faried, R. M. (2025). *Regulatory Policy for Village Cooperatives: The KDKMP Model in Regional Development Planning. Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Science, and Multi-Disciplinary Studies (IC-CESSMUDS).*
- Asep Koswara, E. A. (2025). *Prospects and Challenges of Multi-Stakeholder Cooperatives in Supporting Community-Based Economy in Indonesia. RIETR.*
- Ataya, N. A. (2025). *Perbandingan Efektivitas Koperasi Merah Putih Dan Bumdes Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa. Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi, 50-65.*
- Efendi, M. J. (2025). *Collaborative Governance in Prevention of Village Fund Corruption Crimes in Indonesia: A Case Study in Bandung Regency West Java Province. Journal of Humanities and Social Sciences Studies (JHSSS).*, 68-86.
- Emir Surya Rahmajati, I. r. (2025). *Cooperatives For Change: Mapping Three Decades Of Sustainable Development In Indonesia. Proceeding Of The International Seminar On Business, Economics, Social Science, And Technology (Isbest).*
- G. Sandita Pratama, N. R. (2024). *The urgency of legal protection for children as victims of trafficking in Indonesia: A human rights perspective* (Urgensi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perdagangan orang di Indonesia: Perspektif hak asasi manusia). *Journal of Safety Science and Resilience.*
- Gede Sandita Pratama, N. P. (2024). *Law Enforcement against the Crime of Child Trafficking in the Legal Area of the Buleleng Police (Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng). journal of Law and Sustainable Development.*, e2501.
- Hendra Segara, H. N. (2024). *Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Implementation of Public Service Digitalization Policy at the Bekasi Regency Land Office). Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.*, 101-110.
- Indonesia, C. (2025, July 27). *BPS: Jumlah Penduduk Miskin 2025 Ada 23,85 Juta Orang .* From YouTube: [https://www.youtube.com/watch?v=UrIf9a8q\\_3Q](https://www.youtube.com/watch?v=UrIf9a8q_3Q)
- Indraini, A. (2025, July 25). *BPS: Angka Kemiskinan RI Terendah dalam 2 Dekade.* From detikFinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8028465/bps->

- angka-kemiskinan-ri-terendah-dalam-2-dekade#google\_vignette  
Lokantara., D. M. (2025). *Modern Cooperative Governance in Indonesia: Policy Insights from Koperasi Usaha Mandiri, Belitung. Journal of Tourism Economics and Policy (JTEP)*.
- Maxencius Tri Sambodo, S. H. (2023). *Towards a New approach to community-based rural development: Lesson learned from Indonesia. Cogent Social Sciences*.
- Muhammad Taufiq, S. d. (2022). *Power dynamics in collaborative rural planning: The case of Pematang Tengah, Indonesia. Sage Journals*.
- Mukhtar Galib, A. A. (2025). Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Pembentukan Koperasi Digital. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 200-215.
- Rixvan Afgani, I. W. (2025). Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan.
- Sarman. (2025, July 28). Jumlah Penduduk Miskin Turun, Mensesneg: Pemerintah Terus Bekerja Keras Atasi Kemiskinan. From Sekretariat Negara Republik Indonesia: [https://www.setneg.go.id/baca/index/jumlah\\_penduduk\\_miskin\\_turun\\_mensesneg\\_pemerintah\\_terus\\_bekerja\\_keras\\_atasi\\_kemiskinan](https://www.setneg.go.id/baca/index/jumlah_penduduk_miskin_turun_mensesneg_pemerintah_terus_bekerja_keras_atasi_kemiskinan)
- Wahyuningrat, S. R. (2024). *Does Rural Development Enable Community Empowerment? Pakistan Journal of Life and Social Sciences*.